

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Landasan Teori**

Pada landasan teori ini, peneliti akan menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah pajak daerah sektor pariwisata. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu pajak daerah sektor pariwisata, jumlah obyek wisata, jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel.

##### **2.1.1 Ekonomi pembangunan**

Menurut (Amalia, *et al.*, 2022) ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, usaha-usaha serta hambatan yang dihadapi, dan kebijakan-kebijakan yang diambil dari keseluruhan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Teori-teori dalam ekonomi pembangunan yang pernah ada dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan strategi pembangunan khususnya di negara berkembang adalah teori pertumbuhan dan teori pembangunan.

##### **A. Teori pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah bentuk perbaikan terhadap kesejahteraan material secara terus menerus dalam jangka panjang yang dapat dilihat dari lancarnya distribusi barang dan jasa. Atau dengan kata lain,

pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Priyono *et. al.*, 2023). Sedangkan menurut Fatimatuzzahro (2022), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Hal ini berkaitan dengan adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat perekonomian sebagai sesuatu yang berkembang dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Pada umumnya, suatu wilayah yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju. Tingkat permintaan komoditas yang lebih tinggi menghasilkan pendapatan yang akan disalurkan menjadi investasi. Selanjutnya, investasi tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk meningkatkan produksi. Demikianlah proses pertumbuhan ekonomi berkesinambungan

#### B. Teori pembangunan daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Kedua, mencapai peningkatan ekonomi daerah. Ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam.

Dalam pelaksanaannya pembangunan ekonomi daerah, perlu adanya strategi pengembangan ekonomi daerah yang baik dan terarah agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sendiri erat kaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok (Arsyad, 1999) :

1. Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas Dilakukan dengan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah.
2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah yang sehat.
3. Strategi Pengembangan SDM Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi.
4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kegiatan pembangunan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat di suatu daerah atau dikenal dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial. Misalnya, melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.

### 2.1.2 Teori Ekonomi Publik

Menurut (Guritno, 2002;2) ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat, pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian mengenai teori ekonomi publik pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus menggunakan kebijakan apa yang sesuai dalam menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat yang ada di suatu daerah salah satunya adalah pendapatan asli daerah sebagai tenaga dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Pada saat pendapatan asli daerah tinggi maka pemerintah dapat lebih mudah untuk melakukan pembangunan baik infrastruktur maupun kepentingan lainnya yang menyebabkan masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan ekonomi sehingga output yang dihasilkan masyarakat tinggi yang dapat meningkatkan pendapatannya.

#### A. Teori Penyediaan Barang Publik

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dihasilkan pihak swasta kepada masyarakat. Penyediaan barang publik dalam jumlah terlalu besar akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber ekonomi, sebaliknya penyediaan barang publik yang terlalu sedikit akan menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat. A.C Pigou (Guritno,2003:63) berpendapat bahwa penyediaan barang publik akan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun, pajak yang dikenakan atas barang publik tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan

masyarakat. Semakin banyak barang dan jasa publik yang disediakan pemerintah, maka tambahan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan semakin menurun. Semakin banyak barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah, akan semakin besar biaya yang dibutuhkan sehingga menyebabkan konsekuensi semakin besar pula pajak yang akan dipungut dari masyarakat. Keadaan ini menyebabkan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat. Secara teoritis, penyediaan barang dan jasa publik akan optimal, apabila kepuasan yang diperoleh masyarakat sama dengan ketidakpuasan yang didapatkan masyarakat sebagai akibat dari pemungutan pajak.

#### B. Teori Keuangan Publik

Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber daya publiknya. Keuangan publik menganalisis hasil dari kinerja pemerintah melalui kebijakan fiskal, pendapatan dan pengeluaran pemerintah, manajemen utang publik, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan bagaimana dampak alokasi anggaran pemerintah terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Keuangan publik menjadi acuan bagaimana pemerintah melakukan pengadaan, pemeliharaan, dan segala pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan tugas. Menurut Harvey S. Rossen dan Ted Gayer dalam bukunya, *Public Finance* disebut juga dengan istilah *Ekonomi Publik*, yang mengartikan bahwa keuangan publik membahas mengenai analisis berbagai pajak pemerintah dan kebijakan pembelanjanya (Jaelani, 2018). Keuangan publik menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil dari keputusan yang

diambil pemerintah akan sangat besar dampaknya pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta diwilayah tersebut. Sehingga penting menganalisis keuangan publik melalui hasil pendapatan, belanja pemerintah, belanja alokasi sumber dana, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

### **2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu keuangan yang diterima pemerintah daerah dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki pemerintah daerah dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dimanfaatkan sebagai modal dalam membiayai pelayanan dan pembangunan pemerintah daerah, dengan adanya modal tersebut pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan yang maksimal guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah. Salah satu sumber keuangan tersebut adalah pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah, baik yang bersumber dari luar daerah (negeri) maupun yang bersumber dari dalam daerah (negeri). Salah satu sumber dari dalam negeri adalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Suatu daerah dikatakan berhasil dan mandiri, apabila mampu meningkatkan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pasal 1 angka 18, "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (Alghifari, 2018). Adapun menurut (Tobing, 2021) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah yang komponennya itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain - lain PAD yang sah. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan memaksimalkan penerimaan daerah melalui sektor pariwisata.

(Halim, 2007) memberikan definisi pendapatan asli daerah sebagai, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mardiasmo, 2019:130) mendefinisikan pendapatan asli daerah sebagai, penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan hasil kekayaan yang dipisahkan yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang serta memelihara pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor basis yang dapat di maksimalkan. Pariwisata merupakan salah satu sektor penunjang pendapatan suatu daerah. Seiring dengan berjalannya waktu, banyaknya wisatawan yang berkunjung akan ke suatu daerah tertentu tentunya akan memicu masyarakat untuk membuka usaha yang berkaitan dengan penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, usaha travel dan pemandu wisata, dan lain sebagainya. Selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sektor pariwisata ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nasional, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (Khoii, Ani, dan Hartanto, 2018).



#### **2.1.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari:

##### **A. Pajak Daerah**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dll (Alghifari, 2018)

##### **B. Retribusi Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada penerima retribusi. Menurut objeknya, retribusi digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

2. Retribusi jasa usaha, merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewa aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, misalnya: retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan, dan lain-lain.
3. Retribusi perizinan tertentu, kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi (Pasal 18 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000).

#### C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut bersumber dari:

1. Bagian laba dari perusahaan daerah.
2. Bagian laba dari lembaga keuangan bank (sebagai contoh : Bank Daerah).
3. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

#### D. Lain-lain PAD Yang Dipisah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6 ayat 2 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

#### **2.1.5 Sumber Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata**

Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan lain sebagainya dengan satuan rupiah pertahun (Yoeti,1996).

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata bersumber dari:

##### A. Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2010, Pajak Hotel adalah pengenaan (pemungutan) pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel

yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Adapun yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Ada tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Berdasarkan pemungutannya, tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Dasar pengenaan pajak hotel ditetapkan sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur juga dalam peraturan daerah masing-masing. Setiap daerah diberikan kewenangan dalam menetapkan tarif pajak namun tidak melebihi 10%. Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah (Koyongian, Runtu, dan Weku, 2022).

## B. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 3.000.000 perbulan.

## C. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jika objek pajak tersebut adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, maka subjek pajaknya adalah penikmat hiburan baik itu orang pribadi atau badan yang membayar untuk sebuah hiburan. Sementara yang bertindak sebagai wajib pajaknya adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

## D. Retribusi Pariwisata

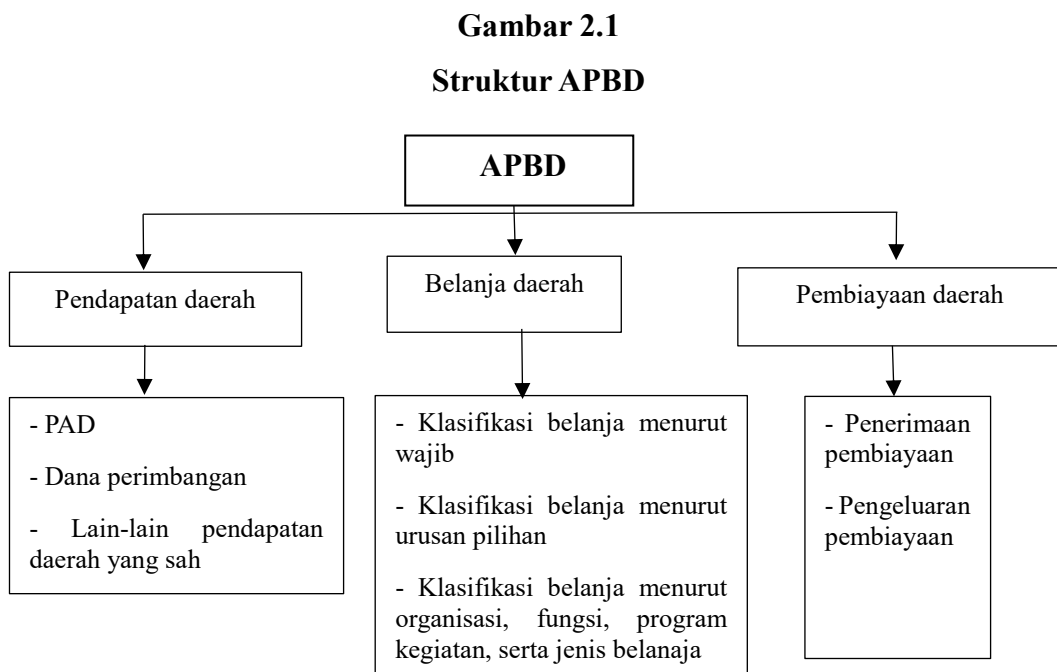
Retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dikenakan pada pengunjung yang datang ke tempat destinasi. Retribusi ini masuk kedalam jenis retribusi jasa usaha. Tujuan utama dari peningkatan retribusi pariwisata :

1. Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas, tempat rekreasi.

2. Untuk meningkatkan ketertiban pengunjung serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### 2.1.6 Pendapatan Asli Daerah Sebagai Bagian Dari APBD

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah sebagai berikut:



Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

B. Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun dana perimbangan terdiri dari; Bagi Hasil Pajak, Dana Lokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan dari Provinsi (khusus Kabupaten/Kota).

C. Pendapatan lain-lain yang sah

Pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah, selain itu juga jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti; hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah dan penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

## 2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

### A. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil. pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika.

### B. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan

Pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian; dan transmigrasi.

### C. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Belanja daerah tersebut mencakup:



- 1) Belanja Tidak Langsung, meliputi: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tak terduga.
- 2) Belanja langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.
- 3) Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi: sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

#### 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi: pembentukan dan cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah.

## **2.2 Pariwisata**

### **2.3.1 Pengertian Pariwisata**

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu, maka kata pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain (Yoeti, 1996:112).

Secara harfiah pengertian pariwisata diartikan sebagai aktivitas menikmati perjalanan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu melepaskan kejenuhan dan kepenatan dari kehidupan sehari-hari. Pengertian pariwisata menurut pendapat beberapa ahli, yaitu :

- 1) Spillane (1982) menyatakan bahwa pariwisata merupakan kegiatan melakukan perjalanan untuk mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan tujuan lainnya.
- 2) McIntosh dan Goeldner (1990) mendefinisikan pariwisata sebagai sejumlah fenomena dan hubungan yang timbul dan interaksi wisata, pemasok bisnis, pemerintah, tuan rumah, dan komunitas tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan dan pengunjung lainnya.
- 3) Yoeti (2008) menyatakan pariwisata yaitu perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari suatu tempat ke tempat lain, selain itu pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (business),

atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Dari pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan pengertian pariwisata adalah kegiatan atau perjalanan terencana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk sementara waktu dengan tujuan bukan untuk mencari nafkah akan tetapi untuk menikmati keindahan, melepaskan kepenatan, kejenuhan yang dialami sehari-hari, menghabiskan waktu luar, mendapatkan kepuasan serta menyenangkan diri.

### **2.3.2 Jenis Pariwisata**

Menurut (James J, Spillane, 1987) pariwisata dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pariwisata diantaranya:

- 1) Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*) Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, menyegarkan pikiran, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.
- 2) Pariwisata Untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*) Pariwisata untuk rekreasi dilakukan sebagai pemanfaatan waktuluang untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani dan menyegarkan keletihan.
- 3) Pariwisata Untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*) Pariwisata untuk kebudayaan ditandai dengan serangkaian motivasi seperti keinginan belajar

di pusat riset, mempelajari adat-istiadat, mengunjungi monumen dan peninggalan bersejarah serta mengikuti festival kesenian.

- 4) Pariwisata Untuk Olah Raga (*Sports Tourism*) Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori, yakni pariwisata olahraga besar seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games serta buat mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting, dan memancing.
- 5) Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*) Pariwisata untuk urusan usaha dagang umumnya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.
- 6) Pariwisata Untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*) Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, simposium, sidang dan seminar internasional.

### **2.3.3 Ekonomi Pariwisata**

Ekonomi pariwisata merupakan aktivitas yang berhubungan dengan fenomena pariwisata untuk memaksimalkan sumber daya berupa modal, manusia dan alam dengan harapan mendapatkan output pariwisata berupa barang dan jasa yang maksimal (Pramono, Kusumastuti & Choerudin, 2019). Keunikan, keaslian, potensi untuk menghasilkan produk dan jasa yang memberikan kontribusi bagi perekonomian di daerah atau wilayah wisata. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam, modal dan manusia dapat diperhitungkan secara ekonomis untuk

menghasilkan permintaan dan penawaran dan efek berganda (*multiplier effect*) yang menguntungkan.

Sektor pariwisata dapat berperan sebagai motor penggerak pemabangunan perekonomian sekaligus berperan penting dalam pengembangan aneka kebudayaan, pelestarian lingkungan dan pemeliharaan hubungan sosial, perlindungan warisan budaya serta penguatan perdamaian dunia. Hal ini didukung pernyataan, sutiksno, dkk (2020) bahwa sektor pariwisata mempunyai korelasi yang positif bagi sumber devisa (pendapatan) bagi suatu negara dan juga bagi pendapatan masyarakat sekitar di lokasi wisata.

#### **2.3.4 Permintaan dan Penawaran Pariwisata**

Menurut ilmu ekonomi, permintaan merupakan sejumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh pelanggan dan mampu untuk membeli dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Gunn dan Var menguraikan dua unsur penting dalam permintaan pariwisata yaitu wisatawan dan penduduk lokal yang menggunakan sumber daya (produk jasa) wisata. Ketersediaan waktu dan uang pada kelompok tersebut adalah faktor utama. Dengan waktu dan sumber daya yang dimiliki, mereka adalah konsumen utama yang mengkonsumsi produk dan layanan wisata yang disediakan di negara atau daerah tujuan wisata. Faktor lain yang berperan pada permintaan pariwisata adalah aksesibilitas menuju objek wisata, sehingga perlu adanya media yang menghubungkan wisatawan dengan objek wisata tersebut yaitu berupa infrastruktur transportasi. Selain itu, perjalanan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, pengurangan jam kerja, iklim

dan lingkungan hidup serta kebijakan penetapan hari libur. Dari uraian faktor yang mempengaruhi permintaan, terdapat pertimbangan penting yang dilakukan seseorang sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan, yaitu biaya, bentuk perjalanan, waktu, lama berwisata, daerah tujuan wisata, akomodasi yang digunakan, moda transportasi dan lain sebagainya.

Keanekaragaman kekayaan dimanfaatkan sebagai potensi keunikan dan daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut. Daerah yang memiliki sejumlah daya tarik wisata yang menarik akan mampu menawarkan berbagai kegiatan yang unik dan menyediakan sesuatu yang dapat dibeli. Pada umumnya daya tarik suatu objek wisata didasarkan pada:

1. Adanya sumber daya yang dapat memberikan kesenangan, keindahan dan kenyamanan
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya
3. Adanya prasarana yang menunjang wisatawan dalam mendapatkan pelayanan
4. Memiliki daya tarik wisata yang tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk keindahan alam, atraksi, upacara adat, nilai keleluhuran, kesenian dan sumber pengetahuan.

Penawaran pariwisata merupakan produk yang diberikan kepada wisatawan untuk dapat dinikmati. Beberapa aspek produk wisata digolongkan kedalam empat kategori yaitu :

1. Sumber daya alam (udara, iklim, pegunungan, lembah, flora dan fauna, mata air, pantai, bentang alam).

2. Infrastruktur (sistem instalasi air bersih, sistem pembuangan air limbah, jalur gas, dan telekomunikasi) termasuk fasilitas lain yang mencakup jalan raya, pelabuhan udara, kereta api, tempat parkir, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, museum, tempat hiburan, dan pertokoan.
3. Transportasi (pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan bis)
4. Sumber daya kebudayaan dan keramahtamahan penduduk. Selain itu penawaran wisata yang lain adalah atraksi, aksesibilitas, amenities dan pelayanan tambahan (Ashoer., *et al.*, 2021).

### **2.3.5 Dampak Pariwisata Terhadap Ekonomi**

Pariwisata memiliki dampak langsung, tidak langsung, dan terinduksi pada ekonomi lokal, seringkali hal ini dapat terjadi sebagian besar berbeda antar negara, berdasarkan struktur sektor tetapi sebagian besar pentingnya tentang beberapa baik aktivitas pariwisata terkait dengan ekonomi lokal. Lebih besar keterkaitan umumnya diterjemahkan kedalam tingkat yang lebih tinggi dari aktivitas ekonomi lokal (dan pertumbuhan), yang cenderung terjadi ketika perusahaan pariwisata mendapatkan barang dan jasanya (termasuk tenaga kerja) secara lokal sementara tingkat hubungan ekonomi yang rendah terjadi ditempat usaha pariwisata berbeda bergantung pada impor (termasuk staf) untuk memenuhi permintaan mereka. Dampak keseluruhan dari sektor adalah jumlah dari efek langsung, tidak langsung dan induksi yakni sebagai berikut:

1. Dampak langsung mewakili PDB yang dihasilkan oleh kegiatan yang berhubungan langsung dengan pariwisata seperti hotel, agen perjalanan,

maskapai penerbangan, dan operator tur juga sebagai restoran dan aktivitas lain yang melayani pariwisata.

2. Dampak tidak langsung, yaitu dampak yang timbul karena kegiatan yang dilakukan sektor, dan merupakan fungsi dari tiga faktor berbeda:
  - a. Penanaman modal dalam pariwisata: termasuk penanaman modal di semua sektor yang secara langsung terlibat dalam industri pariwisata serta pengeluaran oleh perusahaan di sektor lain pada aset pariwisata seperti transportasi atau akomodasi.
  - b. Belanja pemerintah untuk pariwisata: belanja pemerintah untuk mendukung sektor pariwisata, yang dapat mencakup belanja nasional dan daerah. Kegiatan termasuk promosi pariwisata, layanan pengunjung, administrasi dll.
  - c. Efek rantai pasokan: ini mewakili pembelian barang dalam negeri dan jasa, sebagai masukan untuk produksi hasil akhir mereka, oleh perusahaan di dalamnya sektor pariwisata.
  - d. Induced impacts: mewakili kontribusi pariwisata yang lebih luas melalui pengeluaran mereka yang secara langsung atau tidak langsung dipekerjakan oleh pariwisata sektor (B. Purba *et al.*, 2019; Bonaraja Purba *et al.*, 2019; Purba, 2019).



### **2.3.6 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Penerimaan sektor pariwisata terdiri dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan usaha-usaha pariwisata yang bergerak dibidang pariwisata atau yang berhubungan dengan pariwisata. Penerimaan sektor pariwisata terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah yang menjadi kontribusi untuk pendapatan asli daerah yang dapat diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang berdiri disekitar daerah wisata.
2. Hasil Retribusi Daerah dari sektor pariwisata dapat diperoleh dari retribusi parkir, retribusi biaya masuk, retribusi penginapan, retribusi perijinan di bidang pariwisata dan sebagainya.

Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat dan berkembang dengan baik apabila sektor pariwisata dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai potensi daerah wisata yang akan mendukung perolehan jumlah retribusi suatu daerah.

### **2.3 Peran Sektor Pariwisata**

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja. Peran tersebut antara lain, ditunjukkan oleh kontribusi kepariwisataan dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan oleh kunjungan wisatawan dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan oleh kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, nilai tambah PDB, dan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan

kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, museum, seni dan tradisi kerakyatan dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional. Pariwisata memiliki peran yang penting dalam meningkatkan devisa negara dengan mengupayakan peningkatan jumlah wisman (Widarjono A., 2016).

(Pratyka, 2020) memaparkan suatu dampak pariwisata saat ini antara lain adalah: pertama, dampak ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; kedua, dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga poin diatas dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

#### A. Dampak Ekonomi

Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain.

Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan

wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

#### B. Dampak Sosial

Semakin luasnya lapangan kerja. Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.

#### C. Dampak Kebudayaan

Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah. Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata akan mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan.

Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup. Kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau pantai dan sebagainya, merupakan

daya tarik wisata. Daya tarik ini harus terus dipelihara dan dilestarikan karena hal ini merupakan modal bangsa untuk mengembangkan pariwisata.

Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli. Hal ini merangsang masyarakat untuk memelihara apa yang khas dan asli untuk diperlihatkan kepada wisatawan.

## **2.1 Big Data (Google Trends)**

Salah satu jenis big data yang dapat diterapkan untuk mengetahui minat masyarakat adalah Google Trends, layanan yang menunjukkan seberapa sering suatu topik dibahas, mengidentifikasi tren topik, dan membandingkan data kinerja antara kata kunci (Mustinda, 2019). Big data dari Google Trends merupakan kumpulan informasi dalam jumlah besar yang dihasilkan dari aktivitas pencarian pengguna di Google. Data ini mencakup berbagai kata kunci yang dicari, wilayah tempat pencarian dilakukan, serta tren temporal yang menunjukkan bagaimana minat pengguna terhadap suatu topik berubah dari waktu ke waktu. Karena data ini dikumpulkan dari jutaan pengguna, hasilnya adalah sekumpulan informasi yang sangat besar dan terus berkembang, menciptakan data besar yang dapat memberikan gambaran perilaku dan preferensi pengguna secara global maupun regional.

Google Trends memberikan keunggulan dalam hal analisis tren dengan memperlihatkan bagaimana suatu kata kunci atau topik berkembang. Misalnya, pengguna dapat melihat apakah minat terhadap topik tertentu meningkat atau menurun seiring waktu, memungkinkan prediksi yang lebih baik mengenai pola

perilaku masa depan. Data ini sangat berguna bagi perusahaan dan organisasi dalam memahami pasar dan merencanakan strategi pemasaran, karena mereka dapat menyesuaikan kampanye berdasarkan tren minat konsumen yang sedang berkembang.

Selain itu, big data dari Google Trends juga sangat membantu dalam penelitian akademik, terutama dalam ilmu sosial, ekonomi, dan kesehatan. Peneliti dapat memanfaatkan data ini untuk mendapatkan informasi mengenai pola perilaku masyarakat terkait isu-isu tertentu. Misalnya, di bidang ekonomi, Google Trends dapat digunakan untuk melihat minat masyarakat terhadap produk atau layanan tertentu, yang pada akhirnya bisa menjadi indikator aktivitas ekonomi. Demikian pula dalam penelitian kesehatan, pola pencarian terkait gejala penyakit tertentu dapat menunjukkan penyebaran atau kekhawatiran masyarakat terhadap penyakit tersebut. Penggunaan big data dan analisis Google Trends menawarkan pendekatan inovatif untuk memahami perubahan dalam persepsi dan perilaku masyarakat global (Anasya, 2024).

Kemampuan Google Trends dalam menyediakan data real-time juga menjadikannya sumber informasi yang unik dan berharga. Pengguna bisa memonitor perkembangan minat dari waktu ke waktu, bahkan hingga per jam, terutama ketika ada peristiwa penting seperti bencana alam, krisis politik, atau peluncuran produk besar. Dengan data yang selalu terbaru, Google Trends dapat menjadi alat yang efektif dalam merespons kondisi pasar yang dinamis dan membantu pihak terkait dalam pengambilan keputusan yang cepat.

Secara keseluruhan, big data dari Google Trends merupakan alat yang kaya akan potensi. Penggunaannya tidak hanya terbatas pada kebutuhan pemasaran dan bisnis, tetapi juga memberikan manfaat luas di bidang pendidikan, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Dengan analisis yang tepat, data ini dapat menghasilkan insight yang relevan bagi berbagai sektor, membantu mengidentifikasi peluang, meminimalkan risiko, dan memahami perubahan sosial yang sedang terjadi.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bersangkutan dengan tema pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata dan tingkat hunian hotel terhadap pajak daerah sektor pariwisata. Hal ini berguna bagi peneliti sebagai pembandingan dan juga untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang disedang dilakukan dengan peneliti terdahulu. Tabel penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Sofinatun Najjah, Luluk Fadliyanti, Irwan Suriadi (2022)  Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Hotel dan Wisawaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<b>Tujuan:</b> Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah objek wisata, hotel dan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Lombok Timur periode tahun 2010-2019  <b>Variabel bebas:</b>	Bahwa variabel jumlah hotel, objek wisata dan wisatawan baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan bahwa	<b>Persamaan:</b> Menggunakan data sekunder.  Variabel bebas yang sama yaitu jumlah objek wisata, jumlah hotel, dan jumlah wisatawan.  <b>Perbedaan:</b>

No.	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	Sektro Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2010-2019	<p>Jumlah objek wisata, jumlah hotel dan jumlah wisatawan</p> <p><b>Variabel terikat:</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata</p>	variabel yang paling berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata adalah variabel wisatawan.	Jangka waktu penelitian ini dari tahun 2010-2019.
2.	<p>Andhalia Liza Marie, Rintis Eko Widodo (2020)</p> <p>Analisis Faktor Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Tingkat Penginapan Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata pada Industri Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2007-2018</p>	<p><b>Tujuan:</b> Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis faktor kunjungan wisatawan mancanegara atau asing dan tingkat hunian pada hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sub sektor pariwisata pada industri pariwisata di DIY dalam kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2018, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau asing dan tingkat penginapan pada hotel terhadap penerimaan sektor pad sub sektor pariwisata di provinsi DIY periode 2007-2018</p> <p><b>Variabel bebas:</b> Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara/asing dan tingkat penginapan hotel</p> <p><b>Variabel terikat:</b> Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor pariwisata pada industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	Terdapat pengaruh positif antara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat penginapan hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sub sektor pariwisata di diy tahun 2007-2018.	<p><b>Persamaan:</b> Menggunakan data sekunder.</p> <p>Variabel terikat sama yaitu pad sektor pariwisata.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Rentan waktu di penelitian ini 2007-2018.</p>

No.	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
3.	<p>Fifi Nurainina, Kiki Asmara (2022):</p> <p>Jumlah Wisatawan, Jumlah hotel, dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban</p>	<p><b>Tujuan:</b> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah objek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tuban pada tahun 2006 sampai dengan 2020</p> <p><b>Variabel bebas:</b> Jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah objek wisata</p> <p><b>Variabel terikat:</b> Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban</p>	<p>Hasil yang diperoleh secara parsial menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2006-2020, sedangkan jumlah hotel dan objek wisata memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten tuban pada tahun 2006-2020. Sedangkan secara simultan menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah objek wisata memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tuban.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Menggunakan data sekunder.</p> <p>Variabel terikat sama yaitu PAD.</p> <p>Variabel bebas yang sama yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah objek wisata.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Rentan waktu di penelitian ini 2006-2020.</p>
4.	<p>Hesty Maharani, Suharno, Bambang Widarno (2020):</p> <p>Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Karanganyar)</p>	<p><b>Tujuan:</b> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh kunjungan jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah (2) pengaruh jumlah objek wisata terhadap pendapatan daerah (3) pengaruh tingkat penghunian hotel terhadap pendapatan asli daerah</p> <p><b>Variabel bebas:</b> Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata dan tingkat hunian hotel</p> <p><b>Variabel terikat:</b></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, jumlah objek wisata Berpengaruh terhadap pendapatan daerah, dan tingkat okupansi hotel tidak berpengaruh Pendapatan daerah.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Variabel bebas yang sama yaitu jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, dan tingkat hunian hotel.</p> <p>Variabel terikat sama yaitu PAD.</p> <p>Menggunakan data sekunder</p> <p><b>Perbedaan:</b> Rentan waktu penelitian ini 1998-2018.</p>



No.	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
		Pendapatan Asli Daerah		
5.	<p>Dian Ayu Novita Sari, Made Heny Urmila Dewi (2021):</p> <p>Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali</p>	<p><b>Tujuan:</b> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, dan jumlah hotel secara simultan dan parsial terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali</p> <p><b>Variabel bebas:</b> Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata dan jumlah hotel</p> <p><b>Variabel terikat:</b> Pendapatan asli daerah kabupaten/kota Provinsi Bali</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, jumlah objek wisata, dan jumlah hotel secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, jumlah objek wisata, dan jumlah hotel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Menggunakan data sekunder.</p> <p>Variabel terikat sama yaitu PAD.</p> <p>Variabel bebas yang sama yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah objek wisata.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Rentan waktu di penelitian ini 2014-2018.</p>
6.	<p>Arni Yati Anabokay, Wasiman (2023):</p> <p>Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Kota Batam</p>	<p><b>Tujuan:</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah industri pariwisata di Kota Batam terhadap kuantitas kunjungan wisatawan, kuantitas atraksi wisata, dan tingkat hunian hotel</p> <p><b>Variabel bebas:</b> Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, dan tingkat hunian hotel</p> <p><b>Variabel terikat:</b> Pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Kota Batam</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kuantitas kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada industri pariwisata di Kota Batam, kuantitas objek wisata berpengaruh positif dan secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Pendapatan asli industri di Kota Batam, dan tingkat hunian hotel.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Variabel terikat sama yaitu PAD.</p> <p>Variabel bebas yang sama yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah objek wisata.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Menggunakan kuesioner berbasis google form</p>
7.	<p>Sagung Istri Santhi Permata Sari, Ni Nyoman Yuliarmi (2018):</p>	<p><b>Tujuan:</b> Menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, tingkat</p>	<p>Penelitian ini memperoleh hasil secara simultan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, lama</p>	<p><b>Persamaan:</b> Menggunakan analisis regresi linier berganda</p>

No.	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal, Tingkat Hunian, dan Jumlah Objek Wisata Terhadap PAD Kabupaten Karangasem	<p>hunian hotel, dan jumlah objek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem</p> <p><b>Variabel bebas:</b> Kunjungan wisatawan, lama tinggal, tingkat hunian, dan jumlah objek wisata</p> <p><b>Variabel terikat:</b> PAD Kabupaten Karangasem</p>	tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel, dan jumlah objek wisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem dan secara parsial jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karangasem, sedangkan lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel, dan jumlah objek wisata tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem.	<p>Menggunakan data sekunder</p> <p>Obyek penelitian yang sama, jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel, dan jumlah objek wisata</p> <p>Variabel terikat sama yaitu pendapatan asli daerah (PAD)</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian ini terjadi di kabupaten karangasem Provinsi Bali</p> <p>Rentan waktu di penelitian ini 1997-2016</p>
8.	Selva Nandita Putri, Valdyan Drifanda (2021):  Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2020	<p><b>Tujuan:</b> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata dan retribusi obyek wisata secara parsial dan simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang tahun 2016-2020</p> <p><b>Variabel bebas:</b> Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata, retribusi obyek wisata</p> <p><b>Variabel terikat:</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah, (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan jumlah obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah, (4) terdapat pengaruh positif dan signifikan jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata dan retribusi obyek wisata secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.	<p><b>Persamaan:</b> Variabel terikat sama yaitu pendapatan asli daerah (PAD) Menggunakan data sekunder.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Rentan waktu penelitian ini 2016-2020.</p>
9.	Hanum Isnaini Savira, Niniek Imaningsih, Riko	<p><b>Tujuan:</b> Penelitian bertujuan untuk menganalisis</p>	Dari riset ini menunjukkan hasil variabel jumlah	<p><b>Persamaan</b> Menggunakan data sekunder.</p>

No.	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	Setya Wijaya (2021):  Analisis Pengaruh Sub Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep	bagaimana pengaruh sub sektor pariwisata dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangkalan serta Kabupaten Sumenep  <b>Variabel bebas:</b> Jumlah kunjungan wisatawan, PDRB, belanja modal, range hunian hotel  <b>Variabel terikat:</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD)	wisatawan berdampak negative serta tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variabel PDRB berdampak positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variabel belanja modal berdampak positif serta signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variable tingkat hunian hotel berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	<b>Perbedaan</b> Rentan waktu penelitian ini 2006-2019.
10.	I Gede Yoga Suastika, I Nyoman Mahaendra Yasa (2017):  Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	<b>Tujuan:</b> Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, dan tingkat hunian hotel terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali  <b>Variabel bebas:</b> Jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel  <b>Variabel terikat:</b> Pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat	Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan lama tinggal wisatawan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di provinsi bali. Jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.	<b>Persamaan:</b> Variabel bebas yang sama yaitu jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel.  <b>Perbedaan:</b> Pada penelitian ini variabel terikatnya kesejahteraan masyarakat.  Rentan waktu penelitian ini 2010-2015.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber penerimaan yang juga dinilai cukup potensial dalam meningkatkan pajak daerah sektor pariwisata adalah pendapatan yang berasal dari pariwisata. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang potensial karena dapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) yang dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Keberhasilan pengembangan industri kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti Jumlah Kunjungan wisatawan domestik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah objek wisata, tingkat hunian hotel dan lama tinggal wisatawan.

1. Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara terhadap PAD sektor pariwisata

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata dari mancanegara maupun domestik. Wisatawan yang datang ke Kota Bandung berasal dari berbagai daerah maupun mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kota Bandung. Wisatawan domestik, yang berasal dari dalam negeri atau daerah lain di Indonesia, memberikan kontribusi terhadap PAD melalui pengeluaran mereka selama berwisata, seperti akomodasi, transportasi, makanan/minuman, tiket masuk objek wisata, dan belanja.

Hal ini sesuai dengan teori apabila semakin banyak jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, maka akan semakin besar pendapatan

yang diperoleh dari sektor pariwisata. Di sisi lain, wisatawan mancanegara, yang berasal dari luar negeri, cenderung memiliki daya beli yang lebih tinggi dan melakukan pengeluaran yang lebih besar selama berwisata. Mereka menggunakan akomodasi, transportasi, makan/minum, dan membeli cinderamata dengan nilai yang lebih tinggi. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara akan meningkatkan devisa daerah dan mendorong pertumbuhan PAD sektor pariwisata. Promosi pariwisata, kemudahan akses, dan kualitas layanan yang baik akan menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk berkunjung ke Kota Bandung. Secara keseluruhan, baik jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kota Bandung.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Lusiana *et al.*, 2022), (Andhalia *et al.*, 2020) (Sofinatun *et al.*, 2022) yang menyimpulkan bahwa variabel jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

## 2. Pengaruh jumlah objek wisata terhadap PAD sektor pariwisata

Jumlah objek wisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kota Bandung. Objek wisata merupakan salah satu komponen utama yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Semakin banyak jumlah objek wisata yang dimiliki oleh Kota Bandung, maka akan semakin beragam pilihan bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu dan uang mereka selama berwisata.

Setiap objek wisata yang dikembangkan oleh pemerintah daerah atau pihak swasta akan memberikan kontribusi terhadap PAD sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan setiap pengunjung yang datang ke objek wisata akan membayar tiket masuk, yang kemudian akan menjadi pendapatan bagi pemerintah daerah. Selain itu, keberadaan objek wisata juga akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung pariwisata, seperti akomodasi, transportasi, rumah makan, dan pusat perbelanjaan. Aktivitas ekonomi yang timbul dari sektor-sektor pendukung tersebut juga akan memberikan kontribusi terhadap PAD sektor pariwisata.

Selain itu, pengembangan objek wisata yang menarik dan unik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Wisatawan yang merasa puas dengan pengalaman berwisata di Kota Bandung cenderung akan melakukan kunjungan ulang dan merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain. Hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pada akhirnya akan meningkatkan PAD sektor pariwisata.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah objek wisata yang dimiliki oleh Kota Bandung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Semakin banyak objek wisata yang dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka akan semakin besar pula kontribusi yang diberikan terhadap PAD sektor pariwisata Kota Bandung.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Fifi *et al.*, 2022), (Dian *et al.*, 2021), (Arni *et al.*, 2023) yang menyimpulkan bahwa jumlah objek wisata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

### 3. Pengaruh tingkat hunian hotel terhadap PAD sektor pariwisata

Pengaruh Tingkat Hunian Hotel Terhadap PAD Sektor pariwisata. Terdapat hubungan yang positif antara Tingkat Hunian Hotel dengan PAD Sektor Pariwisata. Tingkat hunian hotel adalah salah satu tolak ukur keberhasilan suatu hotel dalam menjual produknya yaitu kamar. Yoeti dalam Austriana mengungkapkan bahwa, “Semakin banyak wisatawan yang menyewa kamar hotel maka semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh untuk tingkat hunian hotel tersebut.” Jadi dapat diasumsikan bahwa, jika suatu hotel memiliki banyak jumlah kamar yang terjual, maka akan menaikkan jumlah tingkat hunian hotel tersebut, maka secara langsung akan meningkatkan pendapatan hotel yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan daerah melalui pajak hotel yang diterima

Hal ini sesuai dengan penelitian Sanjaya & Wijaya (2020), penelitian Hanum *et al* (2021) penelitian I Gede *et al* (2017) yang menyimpulkan bahwa tingkat hunian hotel memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.

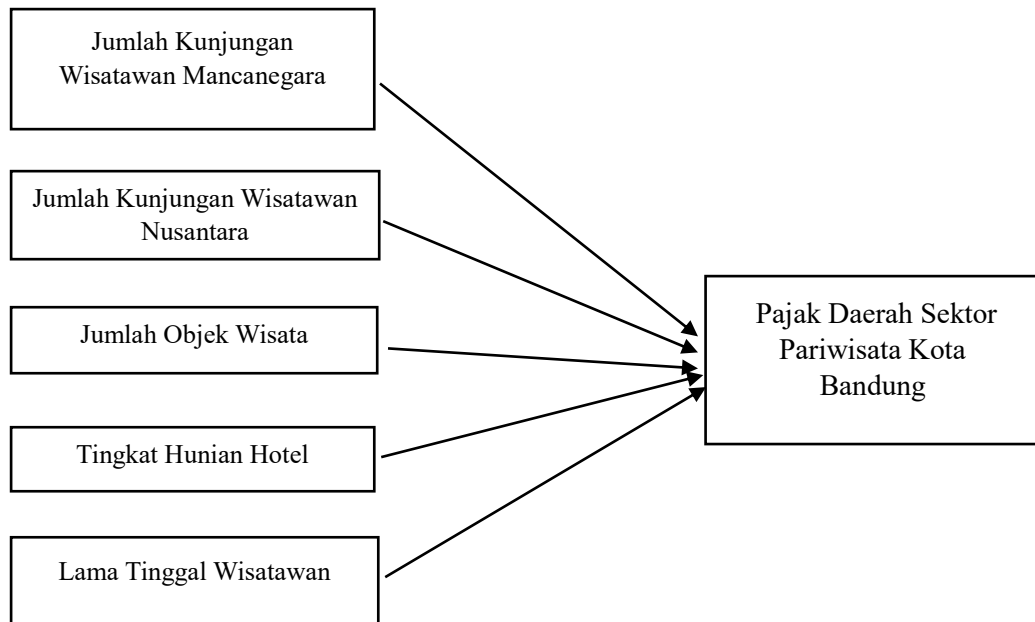
### 4. Pengaruh lama tinggal wisatawan terhadap PAD sektor pariwisata

Lama tinggal wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa wisatawan merupakan orang yang sedang melakukan kegiatan wisata, baik warga Indonesia maupun warga negara asing. Sedangkan lama tinggal wisatawan sendiri menurut (Wijaya, 2011) merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat penerimaan daerah dengan mengandalkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Lama tinggal wisatawan yang dimaksud adalah jumlah

hari yang dihabiskan wisatawan di suatu daerah atau diluar tempat tinggalnya. Terdapat kecenderungan bahwa semakin jauh jarak tinggal wisatawan dengan tempat wisata, maka semakin lama pula jumlah hari yang dihabiskan oleh wisatawan tersebut. Dari kecenderungan tersebut dapat disimpulkan bahwa wisatawan asing akan lebih lama menghabiskan waktu daripada wisatawan lokal.

Menurut (Qadarochman, 2010) semakin lama wisatawan tinggal di tempat wisata, maka semakin besar pula pengeluaran yang mereka lakukan selama berwisata. Wisatawan yang tinggal lebih lama akan menghabiskan uang mereka untuk berbagai keperluan, seperti akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, tiket objek wisata, belanja, dan aktivitas rekreasi lainnya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD sektor pariwisata. Selain itu, lama tinggal wisatawan juga dapat mencerminkan tingkat kepuasan mereka terhadap destinasi wisata di Kota Bandung. Semakin puas wisatawan dengan pengalaman berwisata, maka mereka cenderung akan memperpanjang durasi kunjungan atau melakukan kunjungan ulang di kemudian hari. Hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pada akhirnya akan meningkatkan PAD sektor pariwisata Kota Bandung.



**Gambar 2.1****Kerangka Pemikiran****2.7 Hipotesis**

Hipotesis merupakan pandangan atau dugaan sementara, dimana dugaan ini masih harus diuji kembali. Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

1.  $H_1$  = Diduga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan nusantara, jumlah objek wisata, tingkat hunian hotel dan lama tinggal wisatawan berpengaruh terhadap pajak daerah sektor pariwisata Kota Bandung.
2.  $H_2$  = Diduga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan nusantara, jumlah objek wisata, tingkat hunian hotel dan lama tinggal wisatawan berpengaruh terhadap pajak daerah sektor pariwisata Kota Bandung.